

Daftar Isi

Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Provinsi DIY)	
Machya Astuti Dewi & Saptopo B. Ilkodar	93-100
Explaining Foreign Policy Change	
Vinsensio Dugis	101-104
Legislatif Rente: Persekongkolan Politik Kepala Daerah - DPRD Sebagai Dasar Penyebab KKN di Jawa Timur	
Aribowo.....	105-114
Orientasi Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik	
Budi Prasetyo	115-130
Pemimpin Visioner dan Kaderisasi Kepemimpinan	
Rahma Sugihartati.....	131-136
Tindakan Perdagangan Perempuan dalam Proses Pengiriman Buruh Migran di Madura	
Devi Rahayu.....	137-145
Perspektif Fenomenologi tentang Trafficking TKW	
Mustain Mashud	146-154
Lansia Terlantar: Strategi Membangun Harapan Hidup dan Citra	
Subagyo Adam.....	155-162
Industrialisasi MIGAS dan Eksistensi Masyarakat Lokal: Hasil Studi di Teluk Bintuni, Papua	
Bagong Suyanto	163-173
Program Pembangunan Kesehatan: Masyarakat Desa Wuwuharjo dalam Proyek Inovasi	
Rusyad Adi Suriyanto	174-180
Aksi Borong Kondom pada Pelajar di Kabupaten Pamekasan – Madura	
Yan Ariyani	181-186
Motivasi Ekoturis dalam Pariwisata Berbasis Alam (<i>Ecotourism</i>): Studi Kasus di Wana Wisata Coban Rondo, Malang	
Dian Yulie Reindrawati.....	187-192
Ilmu Manajemen Preskriptif Vs Deskriptif, Suatu Tinjauan dari Perspektif Filsafat Ilmu	
Siswanto	193-202

Perspektif Fenomenologi tentang Trafficking TKW

Mustain Mashud¹

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

There is an associative tendency between poverty and illegal women migrant labors and trafficking. Poverty has forced some women to be migrant labors, so that they can change their life. Being a migrant labor has become a phenomenal social reality among poor women villagers, as if it has become the 'ideology' for the poor in the village, especially for the women. This is for changing their life, as well as their fate. This phenomenon has provided a change in social life norms, and also implicated to the rise of a new form of slavery, as well as women trafficking.

Key words: *trafficking, poverty, illegal, law*

Kajian *trafficking* menarik didiskusikan karena selain berkaitan dengan kemiskinan, hal ini juga berhubungan dengan migrasi internasional Tenaga Kerja Wanita (TKW). Asumsinya, jika angka kemiskinan suatu daerah meningkat, maka jumlah TKW kemungkinan besar semakin bertambah dan probabilitas terjadinya *trafficking* semakin tinggi. Di banyak daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur, masih banyak ditemukan kantung-kantung kemiskinan dan di situlah ditemukan banyak TKW. Data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2002 menunjukkan paling tidak terdapat 500.000 warga Indonesia yang bekerja melalui jalur resmi di luar negeri. Sedangkan, TKW yang tidak melalui jalur resmi tentu lebih banyak. Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 juta sampai 2,1 juta, termasuk yang tak terdokumentasi. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi perdagangan perempuan yang rentan menjadi korban *trafficking* dari Indonesia. Sementara itu, data BPS tahun 2001 menunjukkan bahwa sekitar 37 juta (18.4%) dari 205 juta penduduk Indonesia hidup dalam keadaan miskin dan rata-rata tidak bekerja. Kondisi ini telah mendorong meningkatnya pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara yang lebih kaya seperti Malaysia dan Brunei.

Jika diperhatikan, maraknya arus migrasi internasional mulai meningkat sejak tahun 1990-an, dibandingkan dengan pola migrasi pada tahun-tahun sebelumnya yang lebih bersifat lokal dan regional

(Mantra, 2000; Naim, 1979). Perhatian pemerintah dan kajian-kajian ilmiah karenanya berbeda dan kemudian beralih dari kedua kurun waktu tersebut. Fenomena migrasi internasional terutama dengan maraknya pengiriman TKI ke luar negeri kondisinya lebih problematik tidak saja karena persoalan budaya, birokrasi, politik dan ekonomi, melainkan juga karena berkaitan dengan negara lain. Selain itu, yang terlepas dari amatan pemerintah dan termasuk kalangan akademisi adalah dampak sosial (*kemudharatan*), *social cost* yang harus dihadapi masyarakat, terutama migran perempuan (TKW): *trafficking*.

Meskipun *trafficking* meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahannya, termasuk yang dilakukan oleh para aktifis LSM, umumnya kurang didasarkan pada data yang ada, melainkan hanya dari kasus-kasus yang muncul dan bersifat segmentatif. Sementara, kesadaran masyarakat tentang berbahayanya *trafficking* juga masih kurang, terutama masyarakat di pedesaan yang kurang informasi. Padahal, area operasi para *broker* pencari calon TKW banyak dilakukan di desa-desa yang selain miskin juga terisolasi (Mashud, 2006). Kekurangpahaman dan ketidaktahuan tentang bahaya *trafficking* menyebabkan masyarakat menjadi sasaran paling gampang praktek-praktek *trafficking* yang secara ekonomi memang menjanjikan keuntungan besar setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang.

¹ Korespondensi: M. Mashud, Departemen Sosiologi, FISIP, UNAIR, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telp.: (031) 5011 744. Email: mustaemha@yahoo.com, mustain_fisip@unair.ac.id

Karena berbagai dampak yang ditimbulkannya (positif maupun negatif), buruh migran telah menjadi satu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji tidak saja dari perspektif makro seperti sosial ekonomi dan kebijakan negara, tetapi juga perspektif sosiologi mikro sebagaimana yang digunakan dalam tulisan ini yaitu *fenomenologi*.

Trafficking

Merujuk pada *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (2000) trafficking setidaknya terdiri atas tiga komponen: (1) rekrutmen (recruitment), (2) transportasi (transportation) dan (3) perbatasan (border). Rekrutmen meliputi semua aktifitas proses perpindahan dari tempat asal, bisa dari tempat kelahiran atau tempat pertama dimana perempuan diajak (di luar tempat kelahirannya), atau tempat dimana mereka bertempat tinggal sementara (Darwin, Wattie & Yuarsi (eds.), 2003: 244). Transportasi meliputi proses pergerakan dari tempat asal atau tempat dimana korban pertama kali ditemukan menuju ke tempat tujuan. Selama dalam perjalanan, korban sangat mungkin transit di beberapa tempat sebelum mencapai daerah tujuan. Perbatasan dan lintas-batas merefleksikan aspek transportasi internasional dimana korban memasuki perbatasan daerah (negara) lain.

Secara hukum, *trafficking* merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang terkait dengan banyak orang dan kelompok. Maka, *trafficking* memiliki definisi yang sangat kompleks. *Trafficking* adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah atau antarnegara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan perempuan dan anak, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (seseorang tidak mempunyai pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang). Selain itu, juga memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal ataupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya.

Trafficking tak hanya terjadi dalam bentuknya yang “klasik” seperti untuk kepentingan bisnis seks

komersial dan kerja paksa di pabrik-pabrik industri, perkebunan, dan rumah tangga, tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk yang lain. Misalnya, karena “budi baik” wak Haji, ia harus rela menjadi istri simpanannya. Atau kisah, Dar, yang tengah pisah ranjang, justru masyarakat menghendaknya agar ada laki-laki mengencaninya (Koentjoro, 2004: 86-87). Bahkan ada desa tertentu yang sangat bangga dengan reputasi mengirimkan banyak perempuan ke kota untuk menjadi pekerja seks (Murray, 1991 dikutip Koentjoro, 2004)

Trafficking memberikan keuntungan ketiga terbesar di samping perdagangan obat terlarang (narkoba) dan senjata. Uang yang berputar dalam kegiatan itu mencapai milyaran dollar per tahun. Korban *trafficking* terbesar berasal dari Asia; lebih dari 225.000 orang berasal dari Asia Tenggara dan lebih dari 115.000 orang berasal dari Asia Selatan. Bekas negara Uni Soviet saat ini merupakan sumber terbesar kegiatan *trafficking* untuk prostitusi dan industri seks dengan lebih dari 100.000 korban setiap tahun. Dari Eropa Timur diperkirakan lebih dari 75.000 perempuan menjadi korban kegiatan kriminal ini setiap tahun, lebih 100.000 dari Amerika Latin dan Karibia, serta sekitar 50.000 korban dari Afrika. Hampir semua korban dikirim ke Asia, Timur Tengah, Eropa Barat, dan Amerika Utara. Para korban *trafficking* umumnya dijadikan pekerja seks komersial (PSK), pekerja/buruh murah, pembantu rumah tangga (PRT), pengemis yang diorganisir, pengedar narkoba, pekerja di tempat hiburan, konsumsi pengidap pedofilia, pengantin pesanan (*mail order bride*), dan donor paksa organ tubuh.

Dalam laporan Departemen Luar Negeri AS tanggal 12 Juni 2001 mengenai *Trafficking in Persons*, yang dibuat berdasarkan masukan dari kedutaan-kedutaan besar dan konsulat-konsulat AS di seluruh dunia, Indonesia bersama 22 negara lain dipandang sebagai sumber *trafficking*, baik di dalam negeri maupun antarnegara. Sementara itu, Asisten Deputy Urusan Kualitas Hidup Anak, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan bahwa penanganan soal perdagangan manusia di Indonesia setidaknya terkendala oleh tiga faktor. Pertama, istilah *trafficking* belum dikenal oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kedua, belum adanya perangkat hukum yang menangani masalah ini. Ketiga, tidak adanya data konkret praktik *trafficking*.

Indonesia selain dinilai belum memenuhi standar minimum, juga belum bersungguh-sungguh memberantas praktik perdagangan manusia yang mengandung perspektif lebih luas. Secara historis,

fenomena perpindahan (migrasi) penduduk tidak terlepas dari kebijakan negara sejak kolonialisme Belanda, dimulai pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan migrasi diperbarui. Hal ini sangat jelas terlihat kebijakan negara yang tertuang dalam Repelita 1956-1960 yang secara tegas menyebut kata transmigrasi sebagai ganti perpindahan penduduk (Koentjoro, 2004).

Mulai Pelita II, kebijakan migrasi diarahkan ke luar negeri. Meski kebijakan migrasi berubah, namun ciri eksploitasinya tetap muncul dan bahkan dipertahankan. Sejak itu, fenomena migrasi, termasuk migrasi TKI keluar negeri mulai Pelita II hingga Pelita VI, terjadi lonjakan, terutama TKW. Lihat misalnya, pada Pelita V, jumlah TKI perempuan (TKW) mencapai 67,8% dari total TKI yang dikirim. Selama Pelita VI, pemerintah pernah menargetkan pengiriman TKI sebanyak 1,2 juta ke luar negeri. Data di Depnakertrans tahun 1999 dan 2000 menunjukkan jumlah TKI yang ditempatkan berjumlah 600.061 dari seluruh TKI.

Menjadi TKW

Hasil penelitian Cakrawala Timur 2004 menunjukkan hampir 75% perempuan di Jawa Timur menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Para ibu rumah tangga ini terpaksa bekerja karena tekanan kemiskinan di desanya. Mengingat sumber ekonomi pertanian di desa kurang menjanjikan, pilihan utama dan pertama mereka adalah menjadi buruh migran, termasuk migran internasional: menjadi TKW (Mashud, 2006).

Fenomena migrasi dengan menjadi TKW dapat dijelaskan dari berbagai aspek dan perspektif (Hugo, 1978; Hugo, 1992; Wolpert, 1966; Naim, 1979; Lee, 1970; Massey et al, 1993). Perspektif Teori Ekonomi Klasik Makro misalnya, menjelaskan migrasi terjadi dari negara yang tenaga kerjanya berlebih dan kekurangan modal menuju ke negara yang modalnya berlebih namun kekurangan tenaga kerja. Sebaliknya, Teori Ekonomi Klasik Mikro melihat pentingnya memperhitungkan untung dan rugi sebelum melakukan migrasi antara daerah asal dan daerah tujuan. Teori migrasi demikian umumnya berdasarkan asumsi bahwa (1) para migran adalah individu-individu bebas yang mempunyai otonomi penuh dalam membuat keputusan sendiri; (2) migran adalah manusia rasional yang dalam setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan untung dan rugi serta apa yang terbaik menurut

dirinya; (3) keputusan untuk bermigrasi diambil sebagai individu yang otonom dan hasil kalkulasi rasionalnya (Mantra, 2000). Sementara itu, Todaro (1978) dengan analisis aktor (individu) menjelaskan keputusan bermigrasi berdasarkan kalkulasi rasional terhadap keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*) baik dalam arti finansial maupun psikologis.

Teori Migrasi Klasik sebagaimana dikatakan oleh Everett S. Lee (Mantra, 2000) menjelaskan keputusan bermigrasi ke luar negeri merupakan konsekuensi atas perbedaan keuntungan antara tempat asal dan tempat tujuan baru. Daerah asal yang dinilai kurang menguntungkan menjadi faktor pendorong (*push factors*). Kondisi daerah asal yang 'negatif' dinilai menyebabkan stres dan tekanan kuat untuk bermigrasi. Sementara itu, menjadi TKW ke luar negeri menjadi faktor penarik (*pull factors*) karena dinilai menjanjikan. Pertimbangan antara kedua faktor inilah yang seringkali menjadi penyebab mengapa orang terpaksa harus berpindah dari daerah asalnya ke daerah baru (Darwin, Wattie, Yuarsi (eds.), 2003: 240). Dorongan bermigrasi menjadi TKW, selain tekanan kemiskinan dan kelangkaan kesempatan kerja, juga dirangsang oleh 'keberhasilan' para TKW yang pulang dari luar negeri. Berbeda dengan Teori Migrasi Klasik, pendekatan ekonomi mikro, Economic Human Capital, berasumsi seseorang memutuskan untuk berpindah ke tempat lain, adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar: sebagai tindakan "investasi" sumber daya manusia yang disamakan dengan investasi di bidang usaha yang lain (Sukirno, 1978: 146).

Semua pendekatan teoritik yang bersumber dari paradigma ekonomi, psikologi, dan demografi lazim dipergunakan dalam analisis-analisis migrasi, yang lebih banyak memusatkan pada motif-motif ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa dimensi migrasi, terutama mengenai kriteria ruang dan waktu (*space and time*) antara migrasi internal (dalam negeri) dengan migrasi internasional, akan tetapi teori-teori tersebut masih banyak dirujuk banyak orang untuk menjelaskan latar belakang orang menjadi buruh migran.

Namun, sejumlah pakar kurang sependapat dengan teori migrasi tersebut karena beberapa alasan: (1) para pekerja migran selain tidak mempunyai otonomi penuh, juga tidak dapat mengambil keputusan secara bebas; (2) untung dan rugi (*rasionalitas*) bukan menjadi faktor determinan dalam setiap keputusan yang diambilnya (*powerlessness*); (3) semua hal yang berkaitan dengan kepentingannya selalu di bawah kontrol. Oleh karena itu, bentuk migrasi seperti itu

adalah berbeda (berlawanan) dengan asumsi Teori Migrasi sehingga migran seperti itu tidak dapat diklasifikasikan secara sederhana sebagai migran, melainkan sebagai *victims of trafficking* (Darwin, Wattie & Yuarsi (eds.), 2003: 242).

Dorongan menjadi buruh migran, terutama TKW juga bisa dijelaskan dengan perspektif sosiologis. Sebut saja misalnya perspektif struktural fungsional. Dalam perspektif ini ketidakseimbangan sosial (*social disequilibrium*) masyarakat pada tingkat lokal desa telah memaksa warga pedesaan mencari keseimbangan baru di luar lingkaran sistem sosialnya, yakni menjadi buruh migran. Persoalannya, para buruh migran pedesaan yang bekerja menjadi TKW ke luar desanya, baik di kota maupun ke luar negeri, umumnya kurang didukung oleh kemampuan dan ketrampilan untuk dapat dan mampu menjadi bagian dari sistem sosial di tempatnya yang baru. Namun, acapkali tidak ada pilihan lain: tetap sengsara dan miskin di desanya, atautkah tetap hidup dengan menjadi TKW dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Hasil penelitian Wirawan (2006) dan Mashud (2006) menunjukkan pilihan kedua yang banyak diambil.

Trafficking TKW

Hasil penelitian Mashud tentang *trafficking* di Jawa Timur (2006) menunjukkan faktor ekonomi (kemiskinan), lingkungan sosial, dan keluarga banyak disebut-sebut sebagai faktor penting penyebab utama mengapa para perempuan pedesaan terdorong menjadi TKW di luar negeri. Kemiskinan memang alasan yang sangat mendasar dan karena itu rentan sehingga membuat calon TKW terjebak dalam *trafficking*. Kemiskinan pula yang mengakibatkan masyarakat kurang (bahkan tidak) mendapatkan akses pendidikan sehingga semuanya itu berakibat pada kurangnya pengetahuan dan wawasan mereka tentang hukum dan informasi tentang dunia luar.

Faktor ekonomi bisa jadi memang penting diperhatikan, namun hasil penelitian Mashud tersebut menemukan telah terjadi variasi faktor ekonomi dimaksud, yakni tekanan ekonomi absolut dan non absolut (relatif) sebagai pendorong perempuan-perempuan menjadi TKW. Di kalangan anak-anak muda desa, umumnya lebih tertarik mencari pekerjaan di sektor industri di kota. Bahkan, sejak 10 tahun terakhir mereka lebih tertarik melakukan migrasi internasional untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Dorongan menjadi TKW, terutama sejak satu dasawarsa terakhir, kian menjadi primadona di kalangan perempuan desa dengan alasan hanya dengan menjadi TKW sajalah mereka bisa mendapatkan uang ‘gede’ untuk mengubah nasibnya. Itulah sebabnya mereka cenderung ‘nekad’ meski dengan cara *illegal* dengan resiko menjadi korban *trafficking*. Menariknya, resiko ter-*traffick* dinilai wajar sebagai suatu resiko, bahkan sebagai ‘nasib’ sial saja.

Namun, kecenderungan demikian itu sejak beberapa tahun terakhir mulai bergeser. Artinya, sumber migran (terutama TKW) tidak selalu dari komunitas miskin dan atau berasal dari daerah miskin, melainkan juga daerah-daerah yang secara sosial ekonomi sesungguhnya relatif cukup. Jika komunitas miskin menyebut menjadi TKW untuk menyambung, mempertahankan dan mencari “uang gede” untuk mengubah nasib hidup; sedangkan bagi komunitas kedua, menjadi TKW lebih dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan status sosial ekonominya. Golongan ini lebih berorientasi kepada upaya peningkatan gengsi status sosial (*instrinsik*). Baik TKW dari daerah miskin (yang karena itu kemiskinan sebagai variabel determinan) maupun TKW yang bukan dari daerah minus (yang sesungguhnya cukup mampu secara sosial ekonomi) ternyata sama-sama berkeinginan untuk mengubah (nasib) hidup mereka.

Faktor kemiskinan sebagaimana acap dikemukakan oleh berbagai kalangan tidak terlalu salah dikatakan menjadi faktor pendorong utama para perempuan menjadi TKW. Tetapi, secara agak ekstrim studi yang dilakukan Mashud menemukan bahwa semangat dan dorongan para perempuan pedesaan menjadi TKW tidak semata-mata karena faktor ekonomi untuk mengubah nasib, melainkan juga sebagai upaya menghindar dari tekanan beban sosial ekonomi keluarga. Jika demikian, maka menjadi TKW merupakan salah satu, atau bahkan merupakan satu-satunya jalan untuk “menghindar dan melarikan diri” dari tekanan dan beban ekonomi keluarga.

Menjadi TKW merupakan bentuk dan ekspresi penghindaran dari beban sosial ekonomi keluarga yang terlembagakan, maka bukankah itu juga berarti dapat dimaknai sebaliknya, yakni sebagai bentuk dan ekspresi pengabaian fungsi perempuan dalam keluarga; pembangkangan terang-terangan terhadap tatanan normatif sosial dan *syar’i* agama dan bahkan negara. Tetapi, bukankah negara memang memberikan peluang sehingga semakin banyak perempuan yang mau menjadi TKW? Dengan

demikian, perempuan yang menjadi TKW adalah korban dari ketidakmampuan dan kegagalan negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Dengan demikian, "kegagalan negara" tersebut tidak saja dapat dilihat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat pedesaan, melainkan juga dalam kebijakan penataan kelembagaan administratif berkaitan dengan prosedur pengiriman TKI/TKW. Misalnya, eksistensi dan keberadaan PJTKI dalam beberapa hal justru kondusif terhadap terjadinya *trafficking*. Selain itu, hampir semua PJTKI, dengan struktur dan "tangan-tangan kanannya" dalam menjaring calon TKW, realitanya sangat sulit dikontrol. Mereka dengan leluasa menjaring calon TKW dengan segudang *iming-iming* dengan proses yang tidak resmi.

Bahkan, kini ada kecenderungan kalau para pengerah tenaga kerja tersebut telah mampu melibatkan para aparatus (oknum) instansi daerah (mulai Depnaker, imigrasi sampai pamong desa). Tragisnya lagi, mereka juga dengan mudah melibatkan para tokoh masyarakat, mulai tokoh agama sampai tokoh lokal lainnya untuk menjadi pen-*supply* calon TKW. Sebagai *reference group*, sudah tentu para tokoh lokal lebih mudah dan lebih gampang menggaet calon TKW, oleh karena mereka lebih dipercaya.

Pola kerja para tokoh lokal ini semula terbatas sebagai "pengumpul" calon TKW untuk kemudian diserahkan kepada *recruiter* dengan imbalan tertentu yang cukup menggiurkan. Ketika *recruiter* merasa sudah cukup banyak mengumpulkan calon TKW, kemudian melaporkan dan atau menyerahkannya kepada UP3CTKI untuk selanjutnya dikirim PJTKI di Jakarta. Di penampungan Jakarta inilah kemudian para calon TKW tersebut "diolah" dan "disiapkan" sehingga layak dijual. Agar dapat segera laku dijual kepada pengguna (majikan) di luar negeri, calon TKW ini (ternyata) juga diklasifikasi tidak saja berdasar kemampuan, kapasitas, dan kompetensinya melainkan juga berdasar pada penampilan dan kecantikannya. Semuanya dilakukan dalam rangka kepentingan ekonomi, komoditas.

Para calon TKW, sesungguhnya sudah mulai terkena *trafficking* sejak ia memutuskan memilih menjadi TKW dengan cara tidak resmi (*illegal*). Sebagian besar kasus *trafficking* terjadi pada TKW secara tidak resmi ini. Ketika calon TKW memutuskan mau menjadi TKW secara ilegal, maka sejak itulah sebetulnya mereka telah "terbeli" oleh sindikat PJTKI. Sebab, sejak itu, bahkan hingga kepulangannya, mereka sudah menjadi 'milik' pengerah tenaga kerja. Mereka tidak mempunyai

posisi tawar apapun. Bahkan nasib mereka ada dan tergantung siapa yang 'membawanya'. Situasi seperti itu sudah tentu membuat mereka sangat tergantung kondusif terjadi dan atau diperlakukan secara sepihak oleh tekong/calo atau majikan.

Kemiskinan absolut dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari harus diakui telah banyak mendorong perempuan pedesaan menjadi TKW. Menjadi TKW dinilai sebagai upaya terakhir untuk menyambung keberlanjutan kehidupan keluarganya (*survival*). Golongan TKW ini acapkali sangat nekat dan kurang mempedulikan nasib dirinya. Bahkan, ada kecenderungan kuat bahwa determinan pendorong menjadi TKW adalah tekanan psikologis akibat tekanan jejasan kemiskinan yang bertubi-tubi tanpa tahu sampai kapan. Oleh karena itu, hanya dengan cara "melarikan" diri menjadi TKW lah mereka merasa terhindar dari jejasan tekanan sosial psikologis akibat kemiskinan di desanya.

Latar belakang ekonomi seperti itu membawa konsekuensi terhadap pilihan (dan cara) menjadi TKW. Bagi perempuan yang terdorong menjadi TKW karena kepentingan *survivalitas* cenderung memilih berangkat dengan cara-cara tidak resmi (*illegal*) dan komunitas TKW macam inilah yang rentan menjadi korban *trafficking*. Sebaliknya, bagi TKW golongan kedua, yang terdorong menjadi TKW untuk mendapatkan 'uang gede' umumnya lebih tertarik memilih cara-cara prosedural (*legal*).

Dalam persoalan proses dan mekanisme kerja di luar negeri, umumnya masih diselimuti ketidakjelasan dan carut marut. Carut-marutnya pelaksanaan dan aturan bagi PJTKI dan agen lokal tenaga kerja ke luar negeri, maraknya praktek suap di kalangan aparat tingkat lokal dan minimnya informasi 'dunia kerja' di luar negeri telah membuat TKW korban *trafficking* terbuai dan tidak lagi merasa perlu memeriksa ulang deskripsi pekerjaan dan kontrak kerja. Para TKW, khususnya korban *trafficking*, umumnya adalah orang-orang desa yang cara berpikirnya masih lugu dan sederhana. Mereka bahkan beranggapan kalau teman, kerabat, tetangga, dan terlebih para tokoh masyarakat lokal di desanya tidak akan menyengsarakan, apalagi menjerumuskan dirinya. Kondisi sosiokultural seperti inilah yang (justru) dimanfaatkan oleh para agen.

Fenomena TKW memang banyak menyimpan segudang persoalan. Namun, melarang mereka menjadi TKW juga hampir tidak mungkin; sebab hal itu sudah menjadi fenomena sosial yang *internalized*; bahkan menjadi salah satu solusi yang dinilai solutif terhadap jejasan kemiskinan keluarga. Hanya, persoalannya bagaimana mengurangi *kemudharatan*

sosial dan moral bagi TKW dan keluarganya. Dalam konteks inilah peran negara menjadi sangat penting dan signifikan.

Dampak menjadi TKW untuk sebagian memang telah banyak membantu perekonomian keluarganya. Bahkan, acapkali TKW telah menjadi simbol fenomenal hadirnya kehidupan baru yang lebih baik dan kesuksesan. Indikasinya, hasil jerih payah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sebagian besar diperuntukkan untuk kebutuhan produktif seperti modal untuk berdagang, membeli tanah, dan membeli motor untuk ngojek. Tetapi, justru sebagian besar di antara mereka yang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja perhiasan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Bahkan, ada kecenderungan kuat sebagian besar TKW memamerkan kekayaan yang mereka peroleh dari hasil jerih payah mereka dari kerja TKW, terutama barang-barang konsumtif bernilai simbolis seperti sepeda motor, televisi, membangun (renovasi) rumah, perhiasan, pakaian dan tidak lepas penampilan baru.

Menarik diperhatikan bahwa selama ditinggal menjadi TKW, keluarga, terutama suami tidak merasa terbebani, apalagi menderita oleh karena harus merawat anak-anaknya. Semuanya dipahami sebagai suatu hal yang biasa dan sudah seharusnya dilakukan. Yang mengagetkan, baik keluarga, maupun suami menilai sudah resiko ketika melihat kenyataan bahwa istrinya atau keluarganya menjadi korban *trafficking*. Meski demikian, masih ada yang menilai merasa lebih menderita karena pengorbanannya tidak sebanding dengan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Perspektif Fenomenologi

Berbeda dengan Hobbes —seorang teoritis individualis yang percaya mengenai hakekat manusia universal yang tidak terpengaruh oleh kekuatan sosial— pandangan modern yang standar berpikiran sebaliknya. Masyarakat adalah sebuah fenomena yang diandaikan oleh kegiatan-kegiatan dan ciri-ciri manusia individual yang berproses secara terus menerus, sehingga tidak bisa direduksikan ke dalam tingkah laku kodrati manusia. Sebab, para individu menemukan kepercayaan-kepercayaan, emosi-emosi dan perilaku individu yang semuanya itu ‘menguasai’ individu (Compbell, 1994).

Durkheim dalam beberapa hal setuju dengan pernyataan Hobbes, bahwa masyarakat berkaitan dengan kontrol atas para individu yang dilakukannya

melalui proses alamiah. Hal ini mengindikasikan kesadaran kolektif muncul mendahului tingkah laku individu. Bukan manusia (individu) yang membentuk masyarakat, melainkan masyarakat yang membentuk manusia. Pandangan holistik ini melihat masyarakat sebagai seperangkat cara tingkah laku yang saling berkait yang telah ada sebelumnya, yang menyatu ke dalam psikologi dan tingkah laku manusia individual, dan mengontrol semua yang khas bersifat manusiawi dari mereka. Bahasa, moralitas, agama, dan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka semuanya adalah produk sosial (Compbell, 1994).

Oleh karena itu, untuk memahami perilaku individu memerlukan pemahaman yang baik tentang masyarakat dan tempat mereka dalam masyarakat tersebut. Studi Durkheim tentang *suicide* menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan (bunuh diri) yang tampaknya sangat (dan paling) personal sebenarnya adalah ungkapan dari faktor-faktor sosial dan bukannya faktor-faktor individual. Bunuh diri, kata Durkheim, tidak bisa dijelaskan dengan motif-motif individual, melainkan ditentukan oleh tipe dan tahap masyarakat yang bersangkutan, khususnya oleh macam solidaritas yang mengikat orang-orang bersama (Compbell, 1994).

Fenomena TKW dalam perspektif makro dipandang sebagai akibat bekerjanya tekanan struktur sosial ekonomi, institusi sosial, dan kebijakan negara yang mengabaikan masyarakat miskin. Fenomena TKW adalah produk sistem sosial. Para TKW sebagai warga masyarakat tak terhindarkan harus mengikuti ‘skenario’ format sistem sosial dan kebijakan pembangunan. Menjadi TKW seolah sebagai suatu model adaptasi bagi perempuan pedesaan untuk menyambung dan mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya. Persoalannya, model adaptasi dengan menjadi TKW ini justru kontraproduktif ketika mereka menjadi korban kekerasan (*trafficking*) karena ketidakmampuannya mengikuti prosedur resmi sebagaimana dikatakan Merton (1968), *illegitimate mean*.

Berbeda dengan model analisis makro, model analisis mikro justru menempatkan individu, para perempuan miskin di desa, sebagai unit analisisnya. Penjelasan paradigma definisi sosial (*social definition*) ini menganggap individu-individu anggota masyarakat bukannya ‘obyek’, benda mati dan karenanya siap ‘dibentuk’ dan selalu dijadikan sasaran kekuatan eksternal (struktur sosial dan budaya), melainkan individu-individu yang aktif, kreatif dan inovatif berkemampuan merespon stimulasi eksternal yang dinilai merugikan kepentingannya. Individu secara subyektif mempunyai kemampuan

dan kapasitas yang memadai sehingga pada gilirannya mampu mereproduksi dan merekonstruksi sesuatu yang dinilai '*given*' oleh masyarakat. Motivasi dan dorongan para perempuan pedesaan yang dalam banyak hal nekat menjadi TKW secara ilegal adalah merupakan respons langsung yang aktif dan kreatif atas kondisi eksternal yang menghimpit kehidupannya. Teori-teori yang biasa dipergunakan dalam model penjelasan mikro ini misalnya teori fenomenologi, teori interaksionisme simbolik, teori wacana, teori pertukaran perilaku, dan sebagainya.

Schutz, sebagai tokoh utama Perspektif Teori Fenomenologi, membangun seluruh pendekatan analisisnya terhadap masyarakat berdasarkan analisis mengenai pengalaman sosial individu (Compbell, 1994: 233). Baginya, analisis makro tentang masyarakat adalah sebuah fiksi dari pikiran pengamat ilmiah yang mendistorsikan kenyataan kehidupan sosial yang dapat ditemukan hanya dalam pengalaman-pengalaman subyek. Metode Husserl dibangun berdasar pada pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya 'diberikan' kepada individu melainkan bersifat 'intensional' dalam arti bahwa pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya pada 'obyek-obyek' yang membuat pengalamannya seperti itu: *apersepsi*. Dengan demikian, kita bisa membersihkan diri dari prasangka-prasangka kita tentang dunia dan mereduksi pengalaman kita sampai unsur-unsur dasarnya pengalaman-pengalaman dan struktur yang mendasari pengalaman-pengalaman itu.

Bagi Schutz, manusia adalah makhluk sosial. Kesadaran dalam kehidupan sosial sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Kesadaran sosial berproses melalui 2 (dua) cara, yakni dengan menerima begitu saja apa adanya realitas sosial di sekitarnya, dan dengan menggunakan tipikasi-tipikasi yang diproduksi dan dikomunikasikan. Sebuah masyarakat dipandang sebagai sebuah komunitas linguistik. Masyarakat berada melalui simbol-simbol timbal balik sehingga kesadaran sehari-hari merupakan kesadaran sosial. Dengan demikian, dunia kehidupan individu merupakan suatu dunia 'inter-subyektif' dan hal ini dalam prosesnya menjadi 'dunia kita' dan menjadi 'milik bersama'. Sejak itu, muncul istilah tesis eksistensi *alter-ego*, pemahaman aku yang lain dan dengan begitu memungkinkan orang saling memahami sesama warga komunitas yang disebut Schutz *consociate* (Compbell, 1994: 243).

Fenomena TKW dan *trafficking* dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang fenomenal. Perspektif teori fenomenologi yang bertolak dari 'paradigma definisi sosial'² memusatkan perhatian pada realitas sosial pada tingkatan mikro-subyektif dan sebagian tingkatan mikro-obyektif yang bergantung pada proses-proses mental dari tindakan sosial (Ritzer, 1975). Teori fenomenologi memandang interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman terhadap tindakan masing-masing individu maupun kelompok. Perspektif ini memfokuskan perhatiannya terhadap pentingnya memahami realitas sosial dalam konteksnya, memahami bagaimana realitas sosial itu diciptakan, dan bagaimana tindakan sosial dilakukan dalam konteks pengertian mereka sendiri.

Teori fenomenologi melihat realitas sosial sebagai suatu realitas subyektif. Dalam konteks ini, realitas sosial secara obyektif diakui memang ada tetapi maknanya berasal dari dan oleh hubungan subyektif (individu) dengan dunia obyektif. Realitas terbentuk secara sosial, sehingga pemahaman tentang realitas sosial itu sendiri dapat dilakukan dengan jalan menganalisis proses bagaimana realitas sosial itu terjadi. Di sini diakui adanya realitas obyektif dengan membatasi realitas sebagai realitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita (Berger & Luckman, 1969).

Karena itu, realitas sosial ini harus dipahami secara substansial, sehingga kita harus berupaya mengerti atau memahami 'makna' (*meaning*) yang mendasari dan atau melingkupi suatu realitas sosial dan historis. Fenomenologi mencari penjelasan bagaimana individu yang unik dan spesifik mengonstruksi secara kolektif suatu 'dunia' kehidupan sosial nyata di sekitarnya. Analisis ini melihat kehidupan sosial dan realitas sosial antara perempuan dan pria dalam banyak hal, termasuk misalnya dalam pembagian kerja, tercipta melalui proses pemberian makna terhadap obyek dan pengalaman yang spesifik (Collins, 1990).

Berhal demikian, maka konsep-konsep sosiologis seperti nilai dan norma sosial, relasi sosial dan institusi sosial, dilihat sebagai hasil dari suatu proses yang disengaja. Kekuasaan pria dalam suatu keluarga dan masyarakat yang secara struktural sangat kokoh dengan dukungan budaya patriarki karenanya memang dibangun dan diproduksi secara sadar oleh kaum pria. Perspektif fenomenologi mengakui

²Thomas Kuhn menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan, paling tidak ada 4 paradigma, pertama paradigma fakta sosial (*social fact*), paradigma definisi sosial (*social definition*), paradigma perilaku sosial (*social behaviour*) dan paradigma campuran.

potensi kreatif dan otonom dari setiap perempuan sebagai individu dan mengakui kapasitasnya untuk 'menentang' berbagai kondisi sosial, kebiasaan, sosialisasi, dan 'tekanan-tekanan' kekuatan pria yang patriarki. Karena itu, menurut pendekatan ini, realitas kasus-kasus *trafficking* TKW dipahami sedalam-dalamnya dengan cara menangkap realitas sosial menurut realitas itu sendiri. Berdasar pendekatan fenomenologi, maka pilihan tindak perempuan untuk bekerja sebagai TKW dilihat sebagai tindakan yang dilakukan sebagai sarana (yang baik atau setidaknya memuaskan) untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Realitas sosial dalam hal ini dianalisis dalam dua rangkaian realitas, yaitu realitas tentang 'tingkah laku' dan realitas tentang 'pikiran'. Karena itu, realitas *trafficking* TKW dilihat sebagai hasil dari interaksi dua elemen, yaitu: tingkah laku manusia (TKW) dan makna yang membarangi tingkah laku tersebut (Berger & Luckman, 1969). Tingkah laku manusia dianggap tidak sepenuhnya dibentuk dan dikonstruksikan, tetapi memiliki keberadaan yang bebas. Dengan demikian, realitas sosial itu dilihat terbentuk karena pemikiran, penilaian, dan keputusan para perempuan TKW, sehingga realitas sosial meliputi tindakan manusia sebagai elemen-elemennya. Realitas sosial terdiri dari suatu lapisan realitas tentang tindakan individu manusia yang terdiri dari 'tingkah laku' dan 'sesuatu yang memberi makna dari tingkah laku' sehingga mengubahnya dalam suatu tindakan. Pilihan penggunaan pendekatan fenomenologi memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih kritis terhadap perilaku sosial yang dilakukan perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi.

Pemahaman tentang fenomena *trafficking* dalam suatu komunitas dapat mengungkap kehidupan perempuan dan relasi gender yang berlangsung dalam komunikasi tersebut. Untuk memahami bagaimana fenomena *trafficking* sebenarnya perlu melakukan pembahasan tentang 'makna' (*meaning*), dan mendalami berlangsungnya perjuangan terhadap sumber daya yang terbatas sebagai perjuangan terhadap 'makna'.

Pemahaman terhadap 'ideologi' perempuan bekerja menjadi TKW adalah penting karena ideologi bernuansa gender merupakan sekumpulan nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap paling mungkin bagi pria dan perempuan, khususnya perempuan dalam mengubah nasib diri dan keluarganya. Ideologi ini dalam prosesnya menentukan bagaimana eksistensi TKW didefinisikan, dipersepsikan, dinilai, dan diharapkan untuk bertindak. Dalam prosesnya, ideologi

ini (akan) diyakini oleh seluruh anggota komunitas, dianggap sebagai sesuatu yang natural, merasuk dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam kesadaran manusia. Menjadi TKW adalah suatu yang lazim, melembaga, dan dalam beberapa hal cenderung menjadi suatu keniscayaan terutama pada masyarakat yang kehidupannya dihipnotis kemiskinan.

Meski demikian, ideologi TKW bernuansa gender tersebut kini tengah berproses menjadi arus besar dan dalam beberapa hal telah menjadi pedoman dan/atau orientasi perempuan dalam keluarga miskin tersebut sebenarnya merupakan 'produk' dari konstruksi sosial juga. Menjadi TKW dikonstruksi dari hari ke hari oleh anggota komunitas melalui interaksi sosial yang melibatkan perempuan dan pria sehingga sifat dan konteksnya bersifat cukup dinamis, mengalami redefinisi, rekonstruksi dan rekonseptualisasi sesuai dengan 'kebutuhan' komunitas. Semakin suatu komunitas terdampar dalam kemiskinan, semakin dibutuhkan perempuan-perempuan untuk siap menjadi TKW.

Perempuan menjadi TKW tak lepas dari persoalan gender. Hal ini berkaitan dengan persoalan mendasar yang melingkupi kehidupan perempuan dalam hubungannya dengan pria melalui pemahaman tentang relasi sosial yang melibatkan antara keduanya (*gender relation*). Relasi gender setidaknya mencakup lima proses yang saling berinteraksi: (1) konstruksi atas pembagian kerja yang berkaitan dengan gender, (2) konstruksi atas simbol dan citra (*image*) yang menjelaskan, mengekspresikan, menekankan, dan memaksa atau kadang-kadang bertentangan dengan pembagian kerja tersebut, (3) interaksi antara perempuan dan pria, antara perempuan dan perempuan, dan antara pria dan pria, (4) proses yang membantu untuk menghasilkan komponen gender dari identitas individu yang meliputi pula kesadaran gender, (5) proses fundamental secara terus-menerus terhadap pembentukan dan pengkonseptualisasian struktur sosial (Acker, 1990: 145-147). Konstruksi sosial atas kelima proses tersebut tidaklah statis, melainkan bersifat dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Penutup

Pilihan menjadi TKW, selain sudah menjadi 'kebutuhan' bagi perempuan miskin di pedesaan, secara teoritik juga sebagai ekspresi model adaptasi mereka atas kebijakan pembangunan yang menghimpit kaum miskin di negeri ini. Sebagai

strategi adaptasi, sayangnya menjadi kontraproduktif dan problematik karena dilakukan dengan cara-cara non-prosedural dan hanya bermodalkan kenekatan. Suatu kenekatan mengindikasikan pada realitas *positioning* mereka. Para perempuan miskin pedesaan (calon) TKW berada dalam posisi subordinat, marjinal, dan papa dalam banyak hal—khususnya pengetahuan, pemahaman, dan akses prosedur-prosedur hukum—sehingga tiada perlindungan dari hukum dan siapapun, termasuk negara. Sebagai pelipur lara dan mengurangi beban derita, walaupun mereka ternoda, diperkosa, diperjualbelikan dan menjadi korban *trafficking*, mereka bukannya memahami ini sebagai hak yang harus diperjuangkan dan diurus tuntas, melainkan sebagai suatu akibat biasa dari suatu usaha, yang pasti mempunyai resiko, dan ada faktor nasib yang ikut menentukan.

Benarkah *trafficking* merupakan resiko, nasib buruk, dan hal yang biasa? Dalam tataran realitas sosial, begitulah adanya. Mulai dari perempuan bekerja di luar rumah sampai nekat menjadi TKW yang semula oleh masyarakat dinilai aneh dan bahkan ditabukan, kini menjadi hal yang biasa dan kini menjadi kebutuhan untuk sekadar bisa hidup. Demikian pula ketika para TKW itu terkena masalah, musibah, menjadi korban kekerasan, perkosaan, mengalami *trafficking* dan menjadi berita besar, menggusarkan banyak orang, dan bahkan menggetarkan nurani manusia; mengingat hal ini telah menjadi kebutuhan untuk tetap hidup yang mempunyai resiko, kemudian dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Begitulah analisis sosiologi mikro, termasuk teori fenomenologi memandangnya.

Daftar Pustaka

- Acker, Joan (1990) Hierarchies, Jobs, Bodies; A Theory of Gendered Organization. *Gender and Society*. 4 (2): 139-158
- Berger, Peter & Luckman, Thomas (1969) Sociology of Religion and Sociology of Knowledge. Dalam: Roland Robertson (ed.), *Sociology of Religion*. Harmondsworth, England: Penguin.
- Collins, Patricia Hill (1990) *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and The Politics of Empowerment*. Boston: Unwin Hyman.
- Compbell, Tom (1994) *Seven Theories of Human Society*. Oxford: Clarendon.
- Darwin, Muhajir & Wattie, Anna Marie & Yuarsi, Susi Eja (eds.) (2003). *Living on the Edges: Cross-Border Mobility and Sexual Exploitation in the Greater Southeast Asia Sub-Region*. Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University
- Hugo, Graeme J. (1978) *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hugo, Graeme J. (1992) Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trend and Policy Implication. Paper Presented at *The International Colloquium On Migration, Development and Gender in Southeast Asia*. Kuantan, University of Malaysia, October 28-31.
- Koentjoro (2004) Memahami Pekerja Seks Sebagai Korban Penyakit Sosial. *Jurnal Perempuan*. No. 36, Juli: 77-91.
- Lee, Everett S. (1970) A Theory of Migration. Dalam: G. J. Demko et al, *Population Geography: A Reader*. New York: McGraw-Hill, 299- 308.
- Mantra, Ida Bagus (2000) *Population Movement in West Rice Communities; A Case Study of Two Dukuh in Yogyakarta Special Region*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Merton, Robert K. (1968) *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press
- Mashud, Mustain (2006) *Studi Eksploratif Trafficking di Jawa Timur Sebagai Dasar Penyusunan Model Pencegahan Anti Trafficking yang Komprehensif dan Terpadu*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.
- Massey, Douglas S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J. E. (1993) Theories of International Migration; A Review and Appraisal. *Population and Development Review*, 19 (3): 431-466.
- Naim, Mochtar (1979) *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, George (1975) *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sukirno, Sadono (1978) *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Petaling Jaya.
- Todaro, Michel P. (1978) *Economic Development in the Third World*. 2nd edition, London: Longman.
- Wirawan, Ida Bagus (2006) *Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri: Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan Bermigrasi Oleh Wanita Pedesaan di Jawa Timur*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Wolpert, Julian (1966) Migration as an Adjustment to Environmental Stress. *Journal of Social Issues*, 22 (4): 92-102.